ABSTRAK

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh:

EKA FITRI WAHYUNI

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rata-rata presentase perkawinan beda agama dari setiap agama di Indonesia di tahun 1980 mencapai 18,3%, tahun 1990 mencapai 26,7% dan tahun 2000 mencapai 19,5%. Berdasarkan jumlah perkawinan beda agama dari tahun ke tahun, maka perkawinan beda agama tetap saja dilaksanakan meskipun telah dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan penulis dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilaksanakan karena perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan di dalam kedua ketentuan hukum tersebut. Perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menentukan status perkawinan yang tidak sah. Hal demikian akan menimbulkan akibat hukum diantaranya terhadap waris yang tidak dapat diperoleh seorang anak dari ayahnya karena anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak tidak sah sehingga hanya dapat

mewaris dari ibunya saja. Akibat terhadap harta kekayaan keduanya diberikan kebebasan untuk mengatur harta kekayaan masing-masing. Akibat terhadap perwalian bahwa perwalian terhadap anak tidak diharuskan untuk memiliki agama yang sama dan perwalian untuk wali nikah juga tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat terhadap pasangan yaitu tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan status hukum tidak sah terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan berakibat pada waris yang tidak dapat diperoleh anak dari perkawinan beda agama. Akibat terhadap harta kekayaan tidak dapat diadakannya *syirkah* (penggabungan harta) di antara perkawinan beda agama. Akibat terhadap perwalian diantaranya tidak dapat diadakannya perwalian anak dan perwalian terhadap wali nikah karena terhalang oleh agama yang berbeda. Akibat terhadap pasangan yaitu tidak tercapainya tujuan dari perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama